

## PENINGKATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN KEPATUHAN PAJAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Diajeng Fitri Wulan<sup>1\*</sup>, Aryan Danil Mirza. BR<sup>2</sup>, Panca Wisesa<sup>3</sup>, Rindy Dwi Ladista<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

[diajengfitriw@feb.unila.ac.id](mailto:diajengfitriw@feb.unila.ac.id)<sup>1</sup>

[aryan.danil@feb.unila.ac.id](mailto:aryan.danil@feb.unila.ac.id)<sup>2</sup>

[panca.wisesa@feb.unila.ac.id](mailto:panca.wisesa@feb.unila.ac.id)<sup>3</sup>

[rindyladista@feb.unila.ac.id](mailto:rindyladista@feb.unila.ac.id)<sup>4</sup>

\*corresponding author

Received: 15-02- 2026

Revised: 03-03-2026

Approved: 20-03-2026

### ABSTRAK

*Pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah sering kali menghadapi tantangan terkait ketidakteraturan administrasi dan rendahnya kepatuhan pajak, terutama pada unit kegiatan ekstrakurikuler. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman perpajakan bagi para pembina ekstrakurikuler. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi minimnya pengalaman pembukuan, pengabaian transaksi nominal kecil, serta kurangnya pemahaman terkait transaksi perpajakan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pelatihan intensif yang mencakup standardisasi bukti transaksi (kwitansi, nota, invoice), sistem pembukuan sederhana menggunakan Buku Kas Umum (BKU), serta prosedur perpajakan sederhana. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta mengenai pemisahan fungsi antara pengendali, pengelola, dan pengguna dana. Peserta kini memahami prosedur penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang lebih akuntabel dengan dukungan dokumentasi yang sah sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba (ISAK 35). Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukakan direkomendasikan agar sekolah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan dan membentuk tim audit internal guna menjamin tata kelola keuangan yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Ekstrakurikuler, Pembukuan, Perpajakan, Sekolah

### PENDAHULUAN

Pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kompetensi, dan keterampilan abad ke-21 peserta didik. Proses pendidikan di sekolah tidak hanya berlangsung melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga diperkuat oleh kegiatan ekstrakurikuler (Lestari & Sukanti (2016); Shilviana & Hamami (2020)) yang berfungsi sebagai wahana pengembangan minat, bakat, kepemimpinan, serta soft skills siswa (Dahliyana, 2017). Secara empiris, keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik (Eccles & Barber (1999); Feldman & Matjasko (2005)).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang wajib dikelola secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, termasuk dalam aspek pendanaan dan pertanggungjawaban (Kemdikbud, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berorientasi pada substansi pembinaan siswa, tetapi juga mencakup aspek administratif dan keuangan yang akuntabel.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan

dukungan anggaran operasional yang bersumber dari dana yayasan maupun kontribusi lain yang sah. Pengelolaan dana kegiatan menuntut adanya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi serta ketentuan perpajakan yang berlaku (Hidayat & Tolla, 2022) serta harus dilakukan dengan standar yang tinggi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum (Utama & Setiyani, 2014). Dalam perspektif organisasi publik dan nirlaba, akuntabilitas merupakan mekanisme penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan (Ebrahim (2003); Connolly & Hyndman (2013)). Selain itu, praktik good governance dalam lembaga pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas dan kinerja institusi (Bush (2008); Mardiasmo (2013)).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek administrasi keuangan kegiatan ekstrakurikuler masih sering luput dari perhatian. Hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar pembina ekstrakurikuler masih memusatkan perhatian pada substansi kegiatan pembinaan siswa, sementara pengelolaan administrasi keuangan belum dilakukan secara optimal. Wawancara awal menunjukkan bahwa lebih dari mayoritas pembina eskul belum pernah menyusun pembukuan sederhana secara terstruktur, serta belum memiliki pemahaman yang memadai terkait standar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa pencatatan transaksi keuangan umumnya masih bersifat insidental, tidak terdokumentasi dengan baik, dan belum mengikuti alur pembukuan yang sistematis.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada ketidakteraturan pencatatan, tetapi juga pada aspek legalitas bukti transaksi dan kepatuhan perpajakan. Beberapa LPJ kegiatan ekstrakurikuler masih menggunakan bukti transaksi yang tidak sah secara akuntansi dan perpajakan, seperti nota tidak bernomor, tanpa identitas penyedia jasa, atau tidak mencantumkan unsur pajak. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka berpotensi menimbulkan permasalahan administratif, temuan audit, serta menurunkan kredibilitas tata kelola keuangan sekolah secara keseluruhan. Studi mengenai pengukuran kinerja dan akuntabilitas di institusi pendidikan menunjukkan bahwa sistem administrasi dan dokumentasi yang tidak memadai dapat berdampak pada lemahnya sistem pengendalian internal (Bracci et al., 2017).

Selain itu, rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana. Literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks sekolah, peningkatan pemahaman pembina ekstrakurikuler mengenai pembukuan sederhana dan aspek perpajakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan kegiatan siswa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu intervensi yang bersifat edukatif dan aplikatif untuk meningkatkan literasi keuangan dan administrasi perpajakan bagi para pembina ekstrakurikuler. Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekolah, khususnya pembina eskul, dalam mengelola dana kegiatan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian difokuskan pada pelatihan pembukuan sederhana, standardisasi penyusunan LPJ, serta pengenalan aspek perpajakan yang relevan dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan para pembina ekstrakurikuler di

sekolah tidak hanya mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan siswa secara optimal, tetapi juga memiliki keterampilan administratif yang memadai dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan sekolah serta mendukung terciptanya budaya akuntabilitas di lingkungan pendidikan menengah.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, yang melibatkan secara langsung para pembina ekstrakurikuler di sekolah sebagai subjek kegiatan. Tahap awal pelaksanaan diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi dan diskusi dengan pihak sekolah guna mengidentifikasi kondisi pengelolaan keuangan kegiatan ekstrakurikuler, tingkat pemahaman pembina eskul terhadap pembukuan dan perpajakan, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perancangan materi dan strategi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta.



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup pembukuan sederhana kegiatan ekstrakurikuler, pengenalan bukti transaksi yang sah secara ketentuan akuntansi dan perpajakan, serta penyusunan LPJ yang sistematis dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung dengan menggunakan studi kasus yang sesuai dengan aktivitas ekstrakurikuler di sekolah.

Tahap akhir kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan *sharing* pengalaman antara tim pengabdian dan para pembina ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus mengidentifikasi kendala nyata yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui forum diskusi tersebut,

peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang selama ini dialami, serta memperoleh klarifikasi dan solusi langsung dari tim pengabdian sesuai dengan konteks masing-masing kegiatan ekstrakurikuler.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kegiatan sekolah, khususnya kegiatan ekstrakurikuler, masih menghadapi tantangan serius pada aspek tata kelola dan kepatuhan administrasi. Sekolah sebagai organisasi nirlaba memiliki karakteristik transaksi yang beragam dan berulang (Suryono, 1999) mulai dari penerimaan dan penggunaan dana BOS, iuran komite, hingga pendanaan kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, hasil diskusi dan sharing dengan para peserta mengungkap bahwa transaksi dengan nominal relatif kecil sering dianggap tidak signifikan sehingga pencatatannya kurang diperhatikan. Padahal, dalam perspektif akuntansi sektor publik, setiap transaksi wajib dicatat secara lengkap dan sistematis sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan pengendalian internal (Mardiasmo, 2013). Pengabaian transaksi kecil dapat mengakibatkan terjadinya kelemahan dokumentasi dan meningkatkan risiko kesalahan pelaporan maupun temuan audit (Simons (1995); COSO (2013)). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas dokumentasi keuangan, seperti penggunaan bukti transaksi yang tidak lengkap, nota tanpa tanggal, atau bukti pembayaran yang dikumpulkan secara tidak sistematis setelah kegiatan selesai, yang pada akhirnya dapat menurunkan kredibilitas laporan pertanggungjawaban sekolah (Hidayat & Tolla, 2022)



**Gambar 2. Diskusi Awal dengan Peserta**

Aspek lain yang menjadi temuan penting dalam kegiatan pengabdian ini adalah kesenjangan pemahaman peserta terhadap ketentuan perpajakan yang melekat pada kegiatan sekolah. Dalam praktiknya, masih ditemukan kurangnya kesadaran untuk mengumpulkan informasi perpajakan mitra atau vendor, seperti NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan masih dipersepsikan sebagai aspek yang kompleks dan terpisah dari aktivitas operasional sekolah, padahal secara regulatif sekolah tetap memiliki kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak. Temuan ini memperkuat urgensi dilakukannya pelatihan yang tidak hanya menekankan pencatatan keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.



Gambar 3. Materi Perpajakan Sederhana

Materi pelatihan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif. Salah satu fokus utama adalah penegasan manajemen peran dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu pemisahan fungsi antara pihak yang mengendalikan kebijakan (Wakil Kepala Sekolah), pihak yang mengelola arus kas (Bendahara), dan pihak yang melaksanakan kegiatan (Pembina Ekstrakurikuler). Melalui pemahaman pembagian peran ini, peserta menyadari bahwa pembina eskul tidak hanya bertanggung jawab pada keberhasilan kegiatan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga tertib administrasi dan kelengkapan bukti transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan.



Gambar 4. Pemateri Berdiskusi dengan Peserta

Selain itu, kegiatan pengabdian ini menekankan pentingnya standarisasi administrasi keuangan melalui pengenalan jenis-jenis bukti transaksi yang sah secara akuntansi dan perpajakan, seperti kwitansi, nota, invoice, bukti terima, dan bukti transfer. Dalam sesi diskusi dan sharing, peserta mengakui bahwa sebelumnya belum memahami perbedaan fungsi masing-masing dokumen tersebut serta syarat formal yang harus dipenuhi, seperti pencantuman tanggal, nominal, keperluan transaksi, tanda tangan, dan materai untuk transaksi di atas nilai tertentu. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membangun laporan keuangan dan LPJ yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.



Gambar 5. Materi Pembukuan Sederhana

Dari sisi sistem pembukuan, pelatihan ini memperkenalkan penggunaan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Masuk, dan Buku Kas Keluar sebagai instrumen sederhana namun efektif untuk memantau posisi saldo dana kegiatan secara real-time. Melalui diskusi berbasis studi kasus, peserta memperoleh gambaran bahwa pembukuan tidak harus bersifat kompleks, melainkan cukup konsisten dan tertib. Pendekatan pembukuan sederhana ini dinilai relevan dengan kondisi sekolah dan kompetensi pembina eskul, sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan secara berkelanjutan.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab

Pembahasan materi inti pelatihan juga mencakup pengenalan dasar-dasar akuntansi, perpajakan, dan pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Peserta diperkenalkan pada konsep pencatatan transaksi masuk dan keluar, kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas honor perorangan, PPh Pasal 23 atas jasa vendor, serta PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa lahan atau bangunan. Selain itu, pelaporan keuangan diperkenalkan dengan mengacu pada ISAK 35 dan SAK ETAP sebagai standar yang relevan bagi entitas nirlaba. Meskipun tidak diarahkan pada penyusunan laporan keuangan lengkap, pemahaman ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Sebagai tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan sistem, kegiatan pengabdian ini mendorong sekolah untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Pemisahan fungsi antara otorisasi dan pencatatan transaksi menjadi poin penting untuk meminimalkan

risiko kesalahan dan penyalahgunaan dana. Selain itu, pembentukan tim audit internal atau satuan pengawas internal (SPI) di tingkat sekolah direkomendasikan sebagai mekanisme pengawasan mandiri untuk memastikan keberlanjutan praktik tata kelola keuangan yang baik.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan kepatuhan pajak di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada pemahaman, kesadaran, dan komitmen sumber daya manusia yang terlibat. Melalui pendekatan pelatihan, diskusi, dan sharing pengalaman, pengabdian ini berkontribusi dalam membangun fondasi tata kelola keuangan sekolah yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi perpajakan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pembina ekstrakurikuler terhadap pentingnya tata kelola keuangan sekolah yang akuntabel dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga berhasil mengubah pola pikir peserta dari sekadar pelaksana kegiatan menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi keuangan sekolah melalui pemahaman pembagian peran yang jelas antara Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, dan Pembina Ekstrakurikuler.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta telah memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pembukuan sederhana secara sistematis melalui penggunaan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Masuk, dan Buku Kas Keluar, serta memahami pentingnya kelengkapan dan keabsahan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan invoice. Selain itu, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang melekat pada kegiatan sekolah, termasuk pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honor, PPh Pasal 23 atas jasa pihak ketiga, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi sewa, menjadi langkah preventif dalam meminimalkan risiko kesalahan administratif dan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi penerapan hasil pengabdian, sekolah perlu menindaklanjuti kegiatan ini dengan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang baku dan mudah diimplementasikan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi antara otorisasi, pelaksanaan, dan pencatatan transaksi, serta pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI), menjadi rekomendasi strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal sekolah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem pengelolaan keuangan sekolah yang tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bracci, E., Maran, L., & Inglis, R. (2017). Examining the process of performance measurement system design and implementation in two Italian public service organizations. *Financial Accountability & Management*, 37(2), 406–421. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/faam.12131>
- Bush, T. (2008). Leadership and management development in education. *Educational Management Administration & Leadership*, 36(2), 271–288.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1741143207087778>
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2013). Charity accountability in the UK : through the eyes of the donor. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 10(3), 259–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRAM-02-2013-0006>
- COSO. (2013). *Internal control—Integrated framework* (Issue May).
- Dahliyana, A. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah. *Jurnal Sosioreligi*, 15(1).
- Ebrahim, A. (2003). Accountability In Practice : Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813–829. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: What kind of extracurricular involvement matters? *Journal of Adolescent Research*, 14(1), 10–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0743558499141003>
- Feldman, A. F., & Matjasko, J. L. (2005). The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions. *Review of Educational Research*, 75(2), 159–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/00346543075002159>
- Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(1), 66–74.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kemdikbud
- Lestari, P., & Sukanti, S. (2016). Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan Hidden Curriculum di Sd Budi Mulia Dua Pandeansari Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 71–96.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Shilviana, K. F., & Hamami, T. (2020). Pengembangan Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler. *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 8(1), 159–177.
- Simons, R. (1995). *Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Harvard Business Press.
- Suryono, B. (1999). Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelaporan Keuangan Organisasi. *Ekuitas*, 3(2), 59–78.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, IX(2), 100–114.